

Implementasi Kebijakan *Global Governance* Pasca Pandemi Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi di Indonesia

Dhea Novita Putri^{1*}, Ranti Astari Rahayu², Fauzan H³, M. Biaggi⁴,
Noer Apptika Fujilestari⁵

¹⁻⁵Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: dheanovita857@gmail.com¹, astariranti@gmail.com², fauzanhidayatullah193@gmail.com³,
bianggi146@gmail.com⁴, noer.apptika@lecture.unjani.ac.id⁵

Korespondensi penulis: dheanovita857@gmail.com*

Abstract. *The research carried out aims to understand the implementation of Indonesia's Global Governance Policy after the pandemic based on Global Governance. After the Covid-19 pandemic, Indonesia faces a big challenge in the context of global governance. The policies taken aim to restore the economy, improve public health, and strengthen international cooperation. Data is collected through library surveys without the need for field surveys, but with data from books and periodical publications. Based on research findings, the analysis explores the steps taken by the Indonesian government, including the implementation of national economic recovery programs, capacity building of the health system, and participation in global initiatives. The results of the analysis show that although there is progress, challenges in coordination and resources still exist, which affect the implementation of the policy. Sustainable efforts and international cooperation are the key to overcoming the long-term impact of the pandemic.*

Keywords: *Implementation, Global Governance, Covid-19*

Abstrak. Riset yang dilakukan memiliki tujuan agar memahami Implementasi Kebijakan Global Governance Indonesia pasca pandemi berdasarkan Global Governance. Setelah pandemi Covid-19, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam konteks global governance. Kebijakan yang diambil bertujuan untuk memulihkan ekonomi, meningkatkan kesehatan publik, dan memperkuat kerjasama internasional. Data dikumpulkan melalui survei perpustakaan tanpa memerlukan survei lapangan, melainkan dengan data dari buku dan penerbitan berkala. Berdasarkan temuan penelitian, analisis mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia, termasuk implementasi program pemulihan ekonomi nasional, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, dan partisipasi dalam inisiatif global. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam koordinasi dan sumber daya tetap ada, yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Upaya berkelanjutan dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi.

Kata Kunci: Implementasi, Global Governance, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Covid-19 ialah kependekan dari Corona Virus Disease 2019 yang merupakan masalah kesehatan menyebar dengan pemicu SARS-CoV-2, bagian dari tipe korona virus. Menurut (Nurian Endah Dwi, 2023) pengidap Covid-19 mampu merasakan suhu tubuh tinggi, bagejala tenggorokan tanpa dahak, juga hambatan menghirup udara. Sejauh ini tidak dikenali -usul virus Corona, meskipun begitu dipahami virus tersebut ditularkan melalui satwa serta berpotensi menulari antara suatu jenis terhadap jenis berbeda, mencakup orang. Agen infeksi ini dikenali bermula oleh wilayah Wuhan dalam China serta mewabah sekitar Desember 2019. Penularan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kian menyebar serta memacu banyak negara

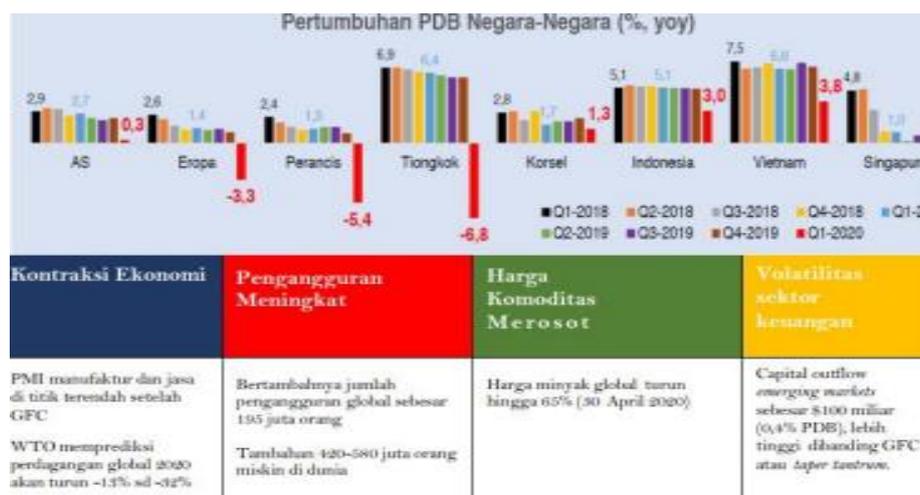
dalam rangka menemukan strategi untuk menekan distribusi infeksi jumlah Covid-19. Periode 2020 merupakan masa yang penuh tantangan bagi berbagai bangsa, situasi tersebut disebabkan oleh kian melonjaknya jumlah virus corona yang memicu banyak pemerintahan kehilangan kekuatan.

Menurut (Nurian Endah Dwi, 2023) informasi internasional hingga 2 Juni 2020 mencatat 6.140.934 jiwa dalam 216 bangsa secara global teridentifikasi pandemi Covid-19, serta sejumlah 373.548 jiwa kehilangan nyawa. Sementara itu, informasi mengenai Indonesia mencatat terdapat 27.549 jiwa yang menyebar di 34 wilayah terinfeksi Covid-19, juga sebanyak 1.663 kehilangan nyawa. Saat Covid-19 pertama kali timbul pada penghujung tahun 2019 serta mulai menyebar serta meningkat pesat secara setempat di Tiongkok pada penghujung bulan Januari 2020, Setelah itu, penyakit ini mulai menyebar ke seluruh bumi selama periode bulan kedua sampai penghujung kelima. Lonjakan masalah kesehatan ini, menyebabkan semua bangsa di dunia wajib menunda strategi yang sudah disusun sebelumnya untuk kemudian dialihkan dengan respons darurat, menggerakkan seluruh potensi untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Mencakup Indonesia, untuk mengelola peristiwa penularan Covid-19 yang semakin bertambah pada Indonesia, otoritas Indonesia menjalankan sejumlah peraturan guna respons cepat untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Peraturan yang dirancang oleh otoritas tersebut ada yang terdokumentasi, dan ada pula yang tidak terdokumentasi, di antaranya Keputusan (SK), serta naskah resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Peraturan tercatat misalnya: KEPPRES No. 11/2020 terkait Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), PERPU No 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau guna Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP No 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, serta sebagainya.

Tercatat mendekati dua tahun durasinya sejak otoritas Indonesia menyampaikan penularan patogen Covid-19 untuk kali pertama di tanggal 2 Maret 2020. Menurut (Novita Maulida, 2021) tak sebatas masalah besar terkait kesejahteraan fisik publik, wabah global

Covid-19 dengan jelas pun memengaruhi keadaan finansial warga. Kondisi ini mulai tampak melalui beberapa tanda sektor ekonomi, misalnya perkembangan finansial, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Indeks Manufaktur (PMI), Retail Sales Index, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta jasa keuangan. Lembaga Finansial pun mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 membawa risiko berkurangnya penghasilan warga. Menurut (Difiani Apriyanti, 2019) Kelompok yang amat terpengaruh, khususnya warga prasejahtera dan rumah tangga yang mencari nafkah di bidang nonformal, diikuti oleh pinjaman gagal bayar pada usaha kecil, struktur korporasi yang bermasalah, hingga keadaan bank yang mungkin menghadapi isu likuiditas, pelemahan nilai rupiah, ketidakstabilan pasar finansial, dan arus keluar investasi. Di samping itu, berbagai bisnis, manufaktur, gerai, dan usaha kecil menengah harus berhenti beroperasi atau bahkan menjalankan pemangkas tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja. Wabah global Covid-19 pun membawa efek signifikan pada penanaman modal, yang mendorong warga untuk lebih teliti saat memperoleh kebutuhan hingga dalam menjalankan pendanaan. Pendana lebih memilih untuk tidak menanamkan modal lantaran pergeseran anggapan bursa dan kaburnya kepastian dalam rantai pasokan.



Gambar 1.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020)

Menurut Eric *dalam* (Tuwu, 2020) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020 Negara Indonesia mempunyai rekam jejak sejarah yang lama berkaitan dengan peristiwa penyebaran wabah penyakit berskala besar di zaman dulu, misalnya gangguan kolera, wabah pes, juga flu. Penyakit kolera, yang untuk pertama kalinya dikenali pada sepuluh tahun kedua masa 1900-an di wilayah Arab Saudi, menyebar ke Indonesia lewat perjalanan peserta haji menggunakan transportasi laut. Sama halnya, wabah pes diakibatkan oleh rodensia yang terbawa masuk melalui pemasukan padi asal Myanmar (Mahandis:2020); Serta flu, sebagai

akibat dari lonjakan kegiatan jual beli pelayaran Hindia Belanda dengan Eropa, meluas di sepuluh tahun pertama masa ke-20.

Menurut (Laely Harum usitasari, 2022) mengacu pada kondisi tersebut, otoritas bersama warga secara independen membutuhkan metode atau rencana yang efisien guna bisa kembali dalam keadaan yang terjaga dengan serangkaian kebijakan dalam perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Rencana perbaikan perekonomian di sejumlah negara melalui metode memberikan bantuan keuangan kepada karyawan, serta mendukung peningkatan pembaruan bagi pelancong, pelonggaran kredit langsung dan transformasi digital dalam peningkatan sektor UMKM serta pemaksimalan industri pariwisata, rencana perbaikan perekonomian pun dapat mengimplementasikan taktik serupa demi pengembangan pengembalian perekonomian, salah satunya adalah penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pengusaha, stimulus pajak, pelonggaran kredit, penyaluran dana usaha, dan pengadaan cadangan produk.

2. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Grindle, 1980) Teori Dua faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Merilee S. Grindle ialah isi kebijakan (*content of policy*) juga lingkungan implementasi (*context of implementation*). Faktor tersebut meliputi: sejauh apa perhatian kelompok sasaran atau audiens target terkandung dalam materi aturan, macam keuntungan yang diperoleh oleh kelompok sasaran, seberapa besar transformasi yang diharapkan dari suatu aturan, apakah posisi suatu kegiatan telah benar, apakah suatu kebijakan sudah mencantumkan pelaksanaannya secara terperinci, serta apakah sebuah proyek disokong fasilitas yang cukup.

Good Governance

Menurut (Fitriani, 2023) Good governance dijelaskan sebagai serangkaian regulasi yang mengatur hubungan antara pemilik saham, manajemen, pemberi pinjaman, otoritas, tenaga kerja, juga para stakeholder internal serta eksternal lain terkait kewenangan serta tanggung jawab mereka, maupun dalam hal ini struktur yang membimbing juga mengawasi organisasi bisnis. Good governance merupakan relasi yang saling mendukung dan membangun antara pemerintah, dunia usaha, serta komunitas, pada dasar-dasar; keterlibatan, kekuasaan hukum, keterbukaan, responsif, mencapai kesepakatan, kesamaan, tepat guna serta hemat biaya, akuntabel serta pandangan strategis. Good governance diartikan sebagai pelaksanaan implementasi kekuasaan dalam manajemen bermacam-macam hal terkait pengelolaan pemerintahan baik dalam aspek kebijakan, keuangan, maupun tata usaha di berbagai level. Terdapat tiga fondasi good governance yang krusial, yakni:

1. *Economic governance* (kesejahteraan rakyat)
2. *Political governance* (proses pengambilan keputusan)
3. *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Apabila dihubungkan dengan pengelolaan administrasi negara, maka tata kelola yang baik merupakan sebuah konsep dan prinsip untuk menetapkan model interaksi antara otoritas negara, sektor bisnis privat, serta komunitas publik, dengan demikian muncul pelaksanaan tata kelola negara yang transparan, partisipatif, juga optimal selaras dengan harapan terwujudnya sebuah komunitas yang maju, berkecukupan, serta independen.

Covid-19

Menurut (Makhabbah Jamilatun, 2022) Virus Corona tidak termasuk satu-satunya wabah global yang muncul selama eksistensi umat manusia. Paling tidak, terdapat sejumlah lima belas wabah global telah berlangsung mendahului timbulnya virus corona. Riwayat lama epidemi luas bahkan telah diawali berabad-abad sebelum era modern Wabah global bermula saat umat manusia mengambil keputusan untuk melepaskan gaya hidup berpindah-pindah serta menentukan bermukim. Walaupun demikian, Wabah global virus corona tergolong sebagai suatu epidemi luas paling besar di riwayat umat manusia menurut jangkauan penyebaran, angka kejadian terinfeksi, serta korban jiwa.

Pada umumnya, wabah global dapat didefinisikan sebagai sebuah peristiwa dengan level kejadian atau penyebaran yang signifikan, terutama berhubungan dengan masa dan jangkauan distribusi yang ekstensif juga secepatnya. Menjelaskan wabah global sebagai penyebaran penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian, wabah global umumnya dihubungkan dengan distribusi penyakit yang dapat ditularkan, seperti pandemi influenza 1918, HIV, juga virus Ebola. Kemudian, menurut jangkauan peristiwanya, wabah global dibagi dalam tiga kelompok, yakni lintas wilayah (berlangsung di satu daratan besar atau antarwilayah), antarwilayah (meliputi dua atau lebih kawasan), dan dunia (terjadi hampir di semua kawasan).

Menurut Liu *dalam* (Makhabbah Jamilatun, 2022) Penyakit Covid-19 ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2, yang merupakan bagian dari kelompok virus Corona yang memicu wabah global SARS serta MERS. Walaupun begitu, SARS-CoV-2 lebih rentan untuk menyebar dibandingkan dengan SARS serta MERS. Covid-19 adalah gangguan kesehatan pada sistem pernapasan dengan kisaran dari yang tidak parah hingga yang serius. Tanda-tanda umum Covid-19 adalah suhu tubuh tinggi, batuk, rasa sakit pada tubuh, serta kesulitan bernapas. Meskipun begitu, mayoritas penderita dengan gangguan tidak parah menginformasikan

hilangnya kemampuan untuk merasakan rasa juga mencium bau. Penyakit Covid-19 dengan tanda-tanda ringan inilah yang menyebabkan mayoritas kejadian positif Covid-19 tidak tercatat, akibatnya potensi jumlah infeksi Covid-19 sesungguhnya lebih besar. Lebih lanjut, tingkat penyebaran yang cukup besar juga menyebabkan banyaknya infeksi tanpa tanda-tanda yang tidak terdeteksi menjadi semakin banyak.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini dilakukan dengan riset kepustakaan, oleh karena itu metode yang dipakai pada riset ini yaitu penelitian kepustakaan. Seperti pernyataan Mendes, Wohlin, Felizardo, Kalinowski proses riset kepustakaan dijalankan melalui cara mengkaji literatur dan menggabungkan serta menganalisis topik-topik terkait. Saat mencari di perpustakaan, dapat digunakan sumber seperti majalah, buku, kamus, dokumen, majalah, dll tanpa harus melakukan riset di tempat. (Difiani Apriyanti, 2019) menyebutkan penyajian teori terkini penggunaan metode pengumpulan data yang akurat adalah jenis tinjauan literatur. Data sekunder digunakan sebagai teknik perolehan informasi pada riset ini. Informasi dikumpulkan dengan implisit dengan mempelajari objek terkait. Penggunaan data sekunder bisa dijelaskan dengan penggunaan model pembelajaran berbasis *augmented reality*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wabah Covid-19 amat berdampak pada sektor ekonomi Indonesia sejak permulaan triwulan kedua tahun 2020. Situasi ini terjadi karena adanya ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengarah pada penutupan beberapa wilayah dengan tujuan menghentikan jalur penyebaran Covid-19. Menurut (Pratiwi, 2022) Kebijakan ini mengakibatkan bertambahnya kemerosotan ekonomi pada bisnis resmi maupun sektor informal. Kemerosotan ekonomi mengakibatkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari usaha yang tidak mampu membayar gaji yang semestinya. Selain itu, kemerosotan ini banyak yang mengakibatkan bisnis memilih untuk tutup atau pailit. Sehingga untuk menindak lanjuti wabah Covid-19 langkah yang diambil oleh pemerintah dalam kesuksesan penanggulangan wabah Covid-19 di negara Indonesia dicapai karena usaha serta kerjasama antara pemerintah serta semua kalangan masyarakat. Pihak berwenang sendiri telah melaksanakan berbagai tindakan penting, seperti pelaksanaan PPKM, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 juga Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), serta vaksinasi.

Menurut (ekon.go.id, 2023) Pemerintah telah merespons wabah Covid-19 dengan strategi “percepatan” dan “pengendalian” melalui KPC-PEN menggabungkan penanganan kesehatan serta perbaikan perekonomian skala negara, komite Penanganan Covid-19 juga

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertanggung jawab atas pengelolaan Jaring Pengaman Sosial selama pandemi Covid-19. Badan ini didirikan oleh Kepala Negara Joko Widodo melalui regulasi Presiden No. 82 Tahun 2020. Beranggotakan tiga komponen: 1) Komite Kebijakan; 2) Satgas Penanganan Covid-19; dan 3) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite Penanganan Covid-19 serta PEN diberi wewenang untuk menerapkan Perpu No.1 Tahun 2020. Komite Kebijakan bertanggung jawab atas penyusunan dan pengawasan aturan yang berkaitan dengan menangani pandemi. Satgas Penanganan Covid-19 bertanggung jawab atas Implementasi strategi yang berhubungan dengan pengelolaan penyakit Covid-19 di tingkat nasional.

Menanggapi pengelolaan penyakit Covid-19 serta perbaikan perekonomian. pemerintah indonesia mendapatkan rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk dijadikan acuan;

1. Meningkatkan kemampuan internal

Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini, penyakit Covid-19 dipandang sebagai tantangan kesehatan yang masih berkelanjutan, pihak berwenang dianjurkan untuk terus meningkatkan kemampuan internal agar jika suatu saat wabah terjadi lagi, pengaruh yang ditimbulkan bisa diatasi secara efektif. Kemampuan tersebut, seperti memperkuat kerjasama antar sektor dalam menghindari, mengidentifikasi, serta menanggapi penyebaran penyakit/pandemi, serta menyusun kembali strategi persiapan menyikapi pandemi.

2. Menggabungkan imunisasi Covid-19 ke dalam kegiatan imunisasi reguler tingkat negara

Berdasarkan statistik vaksinasi Covid-19 hingga 7 Juni 2023, Pemerintah menetapkan sasaran sejumlah 234.666.020 individu sebagai target vaksinasi Covid-19 dengan hasil dosis pertama hingga kurang lebih 203 juta individu (86,8%), dosis kedua 174 juta individu (74,5%), dosis ketiga 68 juta individu (29,3%), serta dosis keempat 3 juta individu (1,3%). Jangkauan imunisasi utama sungguh merupakan aspek yang layak dihargai. Akan tetapi, bersamaan dengan perubahan virus yang terus menyebar, terdapat sejumlah golongan warga yang membutuhkan suntikan penguat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika mengacu pada pedoman WHO mengenai imunisasi Covid-19, ada beberapa golongan warga yang disarankan untuk menerima dosis penguat vaksin demi memperkuat perlindungan terhadap patogen atau mengurangi potensi bahaya kematian secara mendadak akibat tertular virus Covid-19. Sebagai contoh, demi golongan umur 50 tahun atau lebih dengan penyakit penyerta

disarankan untuk menerima dosis penguat vaksin setiap 6 bulan setelah suntikan terakhir yang diberikan. Pada tenaga medis, disarankan untuk menerima dosis penguat vaksin setiap setahun setelah suntikan terakhir yang diberikan.

3. Meneruskan penyampaian informasi tentang potensi bahaya dan partisipasi publik pada pengendalian penyakit yang berisiko menjadi epidemi.

Meskipun situasi Covid-19 yang telah teratasi, risiko penyakit zoonosis dan infeksi baru di Indonesia diperkirakan akan meningkat. Menghadapi potensi risiko gangguan kesehatan tersebut, kuantitas staf medis di Indonesia masih kurang memadai dalam menjalankan tindakan pengendalian dengan maksimal dan komprehensif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu pendekatan utama untuk menyokong negara dalam menghindari timbulnya peningkatan penyakit yang berisiko menjadi epidemi. Secara umum, negara sudah melaksanakan strategi Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) yang berasal atas permulaan komunitas guna berpartisipasi dalam aktivitas observasi, pencatatan, dan reaksi guna menyampaikan tanda peringatan awal tentang kejadian atau situasi kesehatan yang berlangsung dalam kawasan penduduk. Kementerian Kesehatan sudah merumuskan 32 macam penyakit dan unsur bahaya yang menjadi sasaran kegiatan SBM, termasuk Antraks, Malaria, Flu Burung, Hepatitis, Difteri, Kolera, Campak, Malnutrisi, dan sebagainya.

4. Meneruskan sokongan bagi program-program riset penghindaran serta pengendalian penyakit dengan potensi menjadi epidemi

Aktivitas riset mengenai pengendalian gangguan kesehatan yang berisiko menjadi epidemi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Pada 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan “Potensi Indonesia sebagai Hotspot Zoonosis” yaitu Keadaan cuaca tropis dan keramaian populasi dengan kebiasaan perdagangan bebas hewan liar memperbesar potensi penyebaran penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Menanggapi berbagai potensi bahaya penyebaran penyakit, Presiden lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 terkait Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, serta Kimia sudah menyampaikan petunjuk spesifik pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi demi memperkuat aktivitas penelitian sebagai upaya pengembangan kemampuan negara dalam menghindari dan mengatasi penyakit yang dapat menjadi epidemi.

Menurut (Mochamad Ranga Septiyadi, 2023) Selama pandemi berlangsung pemerintah mengeluarkan beberapa program dalam membantu ekonomi masyarakat, sejumlah warga yang kehilangan pekerjaan karena pemecatan serta penerapan PSBB ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan salah satunya program kartu prakerja, dengan fungsi guna memperkuat kreativitas serta produktifitas selama pandemi Covid-19 berlangsung. Program Kartu Prakerja menargetkan golongan yang tertinggal, yaitu tenaga kerja yang terdampak pemecatan serta pegawai yang memerlukan pengembangan keterampilan kerja, meliputi tenaga kerja yang diberhentikan sementara dan pekerja lepas (termasuk pemilik UMKM). Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan sehari setelah keputusan PSBB 2022 Inisiatif baru bagi masyarakat yang sekaligus mengonversinya menjadi bantuan setengah sosial, kebijakan tersebut sudah dijalankan dengan baik.

Kebijakan Pemerintah dalam pemulihan perekonomian

Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Nasional adalah strategi keuangan negara dan kebijakan keuangan. Langkah ini diterapkan secara bersama-sama dengan Pemerintah Lokal serta warga, sebab mereka memainkan peran kunci dalam melaksanakan kebijakan dengan efektif untuk mengembalikan kestabilan ekonomi nasional. Menurut (Kemenkeu, 2020) Pemerintahan menerapkan strategi anggaran dengan tujuan untuk meminimalkan pengaruh buruk pada ekonomi nasional yang akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, langkah ini dirancang untuk memulihkan bisnis para pengusaha, seperti halnya sektor UMKM. Kebijakan pengelolaan fiskal mengandung 3 insentif sebagai arah perubahan, yakni:

1. Akselerasi pengeluaran anggaran negara

Pemerintah mengadakan akselerasi pengeluaran dana investasi, mempercepat pemilihan pejabat keuangan negara, menjalankan proses seleksi, memperlancar pengeluaran alokasi dana sosial serta penyaluran pada dana daerah serta desa. Sasaran akselerasi ini bertujuan supaya bisa menyesuaikan diri pada pola hidup baru dengan perlahan, mengatasi masalah yang muncul setelah pandemi, juga memperkuat perubahan demi keluar dari jebakan pendapatan menengah.

2. Keringanan pajak atas pendapatan

Pemerintah memberikan keringanan jumlah pajak dengan membayar pajak pendapatan Pasal 21, Penghapusan pajak atas pemasukan barang yang tercantum dalam Pasal 22, Pemotongan pajak atas pendapatan yang tercantum dalam Pasal 25, serta Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dipercepatkan. Disamping penyederhanaan pajak pendapatan, otoritas melaksanakan penyederhanaan dan percepatan prosedur pengiriman keluar negeri dan pengadaan barang luar negeri. Akselerasi pengiriman keluar negeri dan

pembelian dari luar negeri diprioritaskan untuk pelaku usaha utama, pemangkasan anggaran pengurangan batasan pengadaan barang luar negeri (produksi, pangan, dan fasilitas kesehatan), serta jasa pengiriman luar negeri melalui jaringan distribusi barang dalam negeri.

3. Perbaiki perekonomian dalam negeri dengan mengimplementasikan strategi Keuangan Negara melalui pelonggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelonggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merencanakan kekurangan yang dapat melebihi 3%, dengan sasaran pada tahun 2023 akan kembali normal ke batas tertinggi 3%. Pelonggaran akan berhubungan dengan distribusi pengeluaran antar lembaga, antar peran, dan antar proyek serta pengeluaran yang diwajibkan. Penyederhanaan distribusi atau penataan kembali pengeluaran Pemerintah Daerah, penyaluran kredit kepada LPS, pengeluaran obligasi negara dan sukuk negara untuk dapat diterima oleh bank sentral, perusahaan negara, pemodal korporasi, dan/atau pemodal kecil. Pemanfaatan asal dana cadangan, dana permanen pendidikan, dan dana yang diatur oleh lembaga layanan publik.

Strategi pemulihan Ekonomi Pada sektor UMKM

Menurut (Dito Aditia Darma Nasution, 2022) Republik Indonesia sudah melaksanakan sejumlah upaya dalam mengurangi dampak dari wabah Covid-19, salah satunya adalah mengurangi tingkat suku bunga BI 7 hari reverse repo sebesar 25 poin dasar menjadi 4,75%, Tingkat bunga fasilitas simpanan turun sebesar 25 poin dasar menjadi 4,00%, dan tingkat bunga fasilitas pinjaman turun sebesar 25 poin dasar menjadi 5,50%. Tindakan ini dilaksanakan untuk mendorong kemajuan ekonomi dalam negeri di tengah terhambatnya harapan pemulihan perekonomian internasional dampak penyebaran penyakit Covid-19. Di samping itu, demi menjaga upaya kenaikan harga serta kestabilan faktor eksternal tetap terkendali serta guna memperkokoh semangat perkembangan ekonomi, Bank Indonesia perlu memperhatikan dinamika ekonomi dunia serta dalam negeri.

a) Penyerahan Pertolongan Sosial Kemasyarakatan

Bantuan kemasyarakatan disalurkan untuk para pengusaha UMKM yang termasuk dalam golongan tidak mampu serta berisiko. Penyaluran stimulus pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini ditujukan untuk usaha dengan pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Cakupan program bantuan kemasyarakatan ini ialah pengurangan biaya listrik 50% bagi konsumen dengan daya 450 watt selama di atas tiga bulan, yang biasanya berpotensi menysasar para pekerja atau pengusaha kecil serta

menengah. Tantangan dalam penyaluran bantuan sosial ini ialah terdapat banyak pihak yang menerima manfaat yang belum tercatat dengan rinci.

b) Pengembangan pendanaan modal operasional untuk UMKM

Program ini dilakukan dengan merangsang lembaga perbankan agar bisa menyediakan pinjaman ringan kepada UMKM. Oleh karena itu, UMKM mempunyai dana operasional yang memadai agar bisa mengelola usahanya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kelangsungan arus kas UMKM. Inisiatif ini ditujukan untuk dua puluh tiga juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum terjangkau oleh dana dari bank dan institusi keuangan.

c) Pengadaan cadangan barang

Barang dari asosiasi dan usaha kecil dalam sektor agrikultur, usaha perikanan, bisnis makanan, dan manufaktur rumahan harus memperoleh bantuan cadangan. Oleh karena itu, ada jaminan bahwa barang dari usaha kecil akan terdistribusi, sehingga asosiasi dan usaha kecil akan dapat memperoleh rotasi stok yang semakin efisien. Aturan tersebut akan lebih dirasakan faedahnya jika disertai dengan usaha perbaikan aliran pengiriman yang terjamin, seperti dengan penyajian sarana atau jasa perdagangan elektronik yang terpercaya di wilayah penopang.

5. KESIMPULAN

Diskusi menyimpulkan wabah Covid-19 memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan PHK yang meluas, penutupan perusahaan, dan penurunan sektor bisnis. Pemerintah Indonesia memulai program vaksinasi, pembentukan KPC-PEN, dan memperkenalkan PPKM guna membantu pemulihan ekonomi. Untuk mendukung perusahaan dan masyarakat, pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, seperti keringanan pajak, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan stimulasi ekonomi. Kebijakan ini diantisipasi untuk mengurangi dampak negatif pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan melalui pemulihan sektor bisnis, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stimulasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Difiani, A. H. S. (2019). Technology-based Google Classroom in English business writing class. *Atlantis Press*, 301, 689–694.
- Dwi, N. E., & Zuhri, A. Z. (2023). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran kasus COVID-19. *Kolaborasi: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan*, 7–12.

- Fitriani, N. (2023). Pelaksanaan good governance di Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Unpublished manuscript*, 1–53.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton University Press.
- Jamilatun, M., & Irmayanti, R. (2022). Sosialisasi vaksinasi dan pembagian sembako pada masa pandemi di Desa Cangakang, Wironanggung, Gatak, Sukoharjo. *Journal Ummat*, 31–38.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Februari 11). Berhasil tangani COVID-19 dengan baik, Menko Airlangga ungkap sejumlah kebijakan strategis pemerintah. Retrieved from <https://ekon.go.id>
- Livana, R. H. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 37–48.
- Maulida, N., & Nugraha, M. N. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 155–166.
- Nasution, D. A. D., & Darma, E. I. (2022). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. *Journal Benefit*, 212–224.
- Pratiwi, Y. R. (2022, Februari 24). Pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Septiyadi, M. R., & Restianti, E. (2023). Program prakerja sebagai program pemberdayaan di bidang ketenagakerjaan di tengah pandemi. *Unpublished manuscript*, 1–11.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. *Journal Publicuho*, 267–278.
- Usitasari, L. H., & Sari, Q. S. (2022). Strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Studi pada kawasan wisata Pulau Derawan Kabupaten Berau). *Jurnal Administrasi Publik*, 285–291.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.